



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HARTONO RIANTO
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN
3. NHK : 409205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.849.676.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/222 m2 di KOTA SURABAYA, HASIL SENDIRI Rp. 4.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/35.89 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 536.476.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/332 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 7.913.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 101.825.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.519.832.963

F. HARTA LAINNYA Rp. 13.000.000

Sub Total Rp. 14.839.333.963

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.839.333.963

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.